



ANALISIS KAJIAN PRAGMATIK UJARAN KEBENCIAN TERHADAP SUKU MINORITAS DI JEPANG

¹Ni Putu Luhur Wedayanti

²Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana
luhur_wedayanti@unud.ac.id

²Ni Made Andry Anita Dewi

²Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana
andry_anita@unud.ac.id

Abstract—Keterbukaan berpendapat di media umum tanpa adanya tanggung jawab dan rasa kemanusiaan sering memberi dampak psikologis serius bagi mereka yang dituju. Salah satunya adalah ujaran kebencian di media sosial. Jepang, pada jaman Meiji menetapkan ideologi negaranya sebagai negara yang monoetnik dan mono lingual. Akan tetapi, di masa sekarang ini, hampir mustahil suatu negara untuk mempertahankan ideologi monoetnik tersebut mengingat mudahnya setiap orang untuk masuk dan keluar dari satu negara ke negara lainnya. Begitu juga yang terjadi di Jepang. Hanya saja, fenomena ini masih sulit untuk diterima oleh beberapa kelompok orang, terutama golongan xenofobia yang anti terhadap orang asing atau orang yang mereka anggap bukan orang Jepang. Golongan yang termasuk rasis ini, melakukan berbagai cara untuk menunjukkan kebencian ataupun penolakannya terhadap komunitas tertentu yang tidak mereka sukai. Komunitas yang minoritas di Jepang seperti Suku Ainu, ataupun imigran yang tinggal di Jepang. Mereka kerap mengalami diskriminasi dan hingga saat ini pun mereka masih menerima perlakuan diskriminatif oleh sekelompok orang. Diantaranya adalah ujaran kebencian yang beredar di media sosial. Ujaran tersebut dianalisis dan dibuktikan sebagai ujaran yang mengandung kebencian menggunakan kaidah-kaidah dalam Ilmu Pragmatik. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik simak dan catat, dengan fokus pada data yang sesuai dengan lingkup penelitian, yaitu berupa pelanggaran maksim kerjasama oleh Grice, dalam kajian Pragmatik.

Kata Kunci : Ungkapan Kebencian, Suku Minoritas, Pragmatik

I. PENDAHULUAN

Jepang adalah negara maju dengan kecanggihan teknologi maupun tingkat kemakmuran rata-rata lebih tinggi daripada negara Asia lainnya, terutama negara-negara di Asia Tenggara. Kemajuan tersebut tentu saja merupakan hasil kerja keras dan kerja sama yang solid semua pihak di negara tersebut dalam jangka waktu yang tidak singkat. Dibalik prestasi Jepang sebagai sebuah negara, didalamnya bergolok permasalahan mengenai xenophobia dan ultranasionalisme sebagai kelompok yang menekan kelompok minoritas lainnya. Kaum xenophobia di Jepang yang anti terhadap warga asing memiliki dasar sejarah yang panjang bagaimana pola pikir tersebut berkembang di Jepang. Sebagian besar masyarakat Jepang memahami identitasnya sebagai negara yang homogen (Omplication et al., 2006; Tsutsui, 2013). Padahal hampir mustahil menemukan negara dengan masyarakat homogen di era sekarang ini. Bahkan ada peribahasa Jepang yang menunjukkan bagaimana perbedaan harus disamakan *deru kui wa utareru* yang berarti ‘paku yang menonjol harus diratakan’. Xenophobia yang terjadi di Jepang, bukan hanya menunjukkan kebencian kepada warga negara asing, akan tetapi juga kepada mereka yang tidak sama atau tidak sesuku dengan masyarakat Jepang daratan.

Sentimen negatif terhadap mereka yang “tidak sama” di Jepang bukan terjadi sekali dua kali ataupun bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa.¹Pada 10 Agustus 2014, seorang anggota parlemen dari partai LDP di daerah Hokkaido, Yasuyuki Kaneko, memposting pendapatnya terkait suku Ainu. Dalam cuitannya, dia mempertanyakan eksistensi suku Ainu, dan bagaimana pengistimewaan yang diberikan kepada suku Ainu. Cuitan ini sangat kontroversial dan memicu konflik bagi yang mendukung pemulihan keadaan suku Ainu, dan bagi yang tidak

¹ <https://www.hurights.or.jp/archives/focus/section3/2015/09/-in-early-autumn-2014-two-hokkaido-politicians-engaged-in.html>

mengakui suku ainu sebagai bagian masyarakat Jepang². Artikel ini berfokus pada analisis pelanggaran maksim kerja sama Grice dalam tuturan yang ditujukan kepada kaum minoritas di Jepang. Sebagai landasan teori, digunakan prinsip kerja sama Grice yang menjabarkan empat maksim kerja sama.

II. METODE DAN PROSEDUR

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan cuitan Twitter dari Yasuyuki Kaneko³ yang diperoleh dalam jaringan, dan dipilih data yang mendukung topik yang dipilih dalam artikel ini. Data yang dimaksud merupakan cuitan, serta balasan cuitan terkait postingan dari Yasuyuki Kaneko mengenai suku Ainu tersebut, yang secara jelas mengacu pada terjadinya pelanggaran maksim kerja sama. Setelah data diperoleh, data tersebut kemudian dianalisis menggunakan prinsip kerja sama dari Grice.

Beberapa hasil penelitian yang menulis mengenai ujaran kebencian, ataupun pelanggaran prinsip kerja sama, digunakan sebagai referensi, diantaranya adalah:

Watanabe, dkk (2018) menulis mengenai Ujaran kebencian dalam media twitter dengan pendekatan pragmatik untuk mendeteksi ujaran ataupun ekspresi kebencian tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pola komunikasi antar budaya yang semakin kompleks dan langsung kerap menimbulkan konflik antara orang yang terlibat tersebut. Konflik tersebut terkadang sudah masuk ke ranah hukum karena sangat merugikan mereka yang terdampak. Meskipun aturan hukum mengenai ujaran kebencian juga mendapat riak protes di Jepang karena dianggap menghalangi kebebasan berpendapat, akan tetapi Watanabe, et al, disini memberikan definisi ujaran kebencian sebagai bahasa yang sifatnya ofensif berdasar pada opininya mengenai suatu ras, ataupun kelompok tertentu. Watanabe, et al kemudian menawarkan kaidah dalam fitur semantik, optimasilisasi paramater sebagai metode dalam mengenali ujaran ataupun unigram kebencian dalam media sosial Twitter. Keakuratan dalam mengenali ujaran kebencian tersebut, dikatakan mampu mencapai lebih dari 70%.

Hidayati (2018) menulis mengenai pelanggaran prinsip kerja sama yang terjadi, kemungkinan ditenggarai oleh adanya makna tersembunyi atau implikatur. Disampaikan dalam artikel tersebut, bahwa, menurut Grice untuk dapat melakukan komunikasi yang baik, seseorang penutur dan lawan tutur harus mematuhi prinsip kerja sama. Namun dalam kehidupan sehari-hari, prinsip-prinsip tersebut tidak selalu dapat dipatuhi, karena berbagai alasan, misalnya tuntutan untuk bersikap santun dengan tidak terlalu berterus terang untuk menghindari konflik. Hasil analisis yang ditemukan yaitu, beberapa percakapan yang mengandung pelanggaran maksim, yaitu pelanggaran maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi dan maksim cara. Ketika pelanggaran maksim terjadi, dijelaskan karena adanya maksud tertentu, seperti adanya pelanggaran dalam percakapan antara tokoh utama pada film Radio Galau FM dikarenakan adanya maksud meyakinkan lawan tutur, memberikan kejutan, menginginkan perhatian, serta menghindari konflik.

Rismaya (2020) melakukan penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan prinsip kerja sama dengan kesopanan berbahasa, serta kemungkinan penyebab munculnya pelanggaran dari prinsip kerja sama tersebut. Sumber data dalam penelitian tersebut adalah cuitan Twitter dari akun @cunggun yang bertema internalisasi seksisme. Penelitian Rismaya kemudian menyimpulkan bahwa kesantunan berbahasa dalam komentar terhadap cuitan akun @cunggun melanggar keempat prinsip kerja sama, serta prinsip kesantunan berbahasa. Kemungkinan terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan karena dilakukan secara sengaja sebagai kritik langsung dengan penggunaan kata-kata kasar dan dorongan rasa emosi penutur terhadap cuitan @cunggun, karena pemilik akun tersebut melakukan praktik internalisasi seksism. Kajian penelitian lain terkait ujaran kebencian terhadap suku minoritas, kajian kesantunan maupun ketidaksantunan sebagai bagian dari Pragmatik juga telah banyak dibahas oleh peneliti lainnya, diantaranya adalah Wedayanti (2021); Wedayanti&Dewi (2021), Dewi&Wedayanti (2021).

Penelitian ini menggunakan kaidah-kaidah dalam ilmu Pragmatik untuk menentukan suatu ujaran yang ditulis ataupun diposkan dalam media sosial Twitter, seperti yang ditarget sebagai objek penelitian memang mengandung kebencian. Pragmatik sebagai salah satu cabang linguistik, mengkaji bagaimana bahasa tersebut digunakan, terutama maknanya dari sudut pandang di luar bahasa itu sendiri. Pemahaman akan konteks yang mengikuti ko-teks sangat penting dimiliki agar tidak menciptakan konflik yang tidak perlu saat berkomunikasi dengan mitra tutur. Adanya struktur sosial vertikal maupun horisontal menciptakan variasi bahasa yang sangat beragam. Berbagai latar belakang penutur dan mitra tutur menjadi variabel yang harus dipertimbangkan untuk menciptakan komunikasi yang efektif

² <https://www.tribunnews.com/internasional/2014/09/01/komentar-anggota-partai-liberal-soal-suku-bangsa-ainu-menuai-kecaman?page=1>

³ https://twitter.com/kaneko_yasuyuki/status/498816070531031041 (diakses 25/10/2021)

dan sukses. Perbedaan situasi dan latar belakang antara mitra tutur dan penutur harus ditengahi dengan kaidah-kaidah dalam ilmu Pragmatik yang dapat menuntun penutur menyelamatkan muka mitra tutur.

Adapun prinsip kerja sama yang digunakan adalah Prinsip Kerja Sama Grice. Empat prinsip kerja sama Grice dijelaskan kembali oleh Rahardi (2010) sebagai berikut :

A. Maksim Kuantitas (*The Maxim of Quantity*)

Di dalam maksim ini, penutur diharapkan untuk memberikan informasi yang hanya dibutuhkan oleh mitra tutur. Informasinya tersebut harus cukup, relatif memadai, dan seformatif mungkin dengan menghindari memberikan informasi berlebih diluar dari yang diminta oleh mitra tutur. Hal ini dikarenakan dapat melanggar maksim ini, jika memberikan informasi berlebihan dan tidak dibutuhkan. Tuturan yang terlalu panjang dianggap tidak penting dan tidak efektif.

B. Maksim Kualitas (*The Maxim of Quality*)

Pada dasarnya maksim ini menjabarkan akan aturan bagi penutur untuk memberikan hanya fakta kepada mitra tuturnya dalam situasi tutur tertentu. Akan tetapi, dalam situasi tutur kerap terjadi bahwa tuturan yang pendek, hanya terdiri dari untaian kejadian nyata sebaliknya terkesan kasar atau tidak sopan dalam budaya tertentu.

C. Maksim Relevansi (*The Maxim of Relevance*)

Di dalam maksim relevansi dinyatakan bahwa agar terjalin kerja sama yang baik antara penutur dan mitra tutur, masing-masing hendaknya memberikan kontribusi yang relevan tentang sesuatu yang sedang dipertuturkan itu. Bertutur dengan tidak memberikan kontribusi yang demikian dianggap tidak mematuhi dan melanggar prinsip kerja sama.

D. Maksim Pelaksanaan (*The Maxim of Manner*)

Maksim pelaksanaan ini mengharuskan peserta pertuturan bertutur secara langsung, jelas, dan tidak kabur. Orang bertutur dengan tidak mempertimbangkan hal-hal itu dapat dikatakan melanggar Prinsip Kerja Sama Grice karena tidak mematuhi maksim pelaksanaan. Dalam kegiatan bertutur sesungguhnya di masyarakat, ketidakjelasan, kekaburan dan ketidaklangsungan merupakan hal yang wajar dan sangat lazim terjadi.

Dari paparan mengenai Maksim Kerja Sama Grice dapat dilihat bahwa maksim Kerja Sama tersebut kerap dilanggar karena situasi tutur yang terpengaruh situasi ataupun kondisi yang berbeda-beda.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data utama yang digunakan adalah cuitan balasan akun @Kaneko Yasuyuki kepada @icloudburabu digunakan sebagai data untuk dianalisis pelanggaran terhadap prinsip kerja sama yang mungkin terjadi.

*Ainu minzoku nante, ima wa mou inain desu yo ne. Seizei Ainukei Nihonjin ga yoi tokoro desuga, kenri wo koushi shimakutteiru koto fugouri. Zeiseisha ni setsumei dekimasen*⁴.

‘Saat ini sudah tidak ada suku Ainu, kan ya. Setidaknya sudah bagus dikatakan orang Jepang keturunan Ainu, sulit memahami tuntunan untuk menggunakan haknya (suku Ainu). Tidak bisa menjelaskannya pada pembayar pajak.’

Sebelumnya cuitan yang memicu konflik pro dan kontra dalam masyarakat Jepang ini memiliki dua fokus hal yang harus diperhatikan, yaitu pernyataan Kaneko Yasuyuki yang mengatakan “tidak ada suku Ainu” dan pernyataannya yang tidak setuju terhadap tuntutan yang berujung pemberian beberapa keistimewaan kepada suku Ainu sebagai suku minoritas. Dari cuitan berikut, yang paling memicu kontroversi adalah pernyataannya mengenai *Ainu minzoku nante, ima wa mou inain desu yo ne* ‘saat ini sudah tidak ada suku Ainu, kan’. Pernyataan ini dapat dikategorikan sebagai pernyataan yang melanggar maksim kualitas dan maksim pelaksanaan. Hal ini dikarenakan Informasi yang diberikan cenderung seperti mengingkari fakta, dan mengandung kekaburan. Maksim kualitas mensyaratkan hal yang disampaikan hanya fakta, akan tetapi Kaneko Yasuyuki menyampaikan bahwa suku Ainu sudah tidak ada. Padahal Suku Ainu telah diakui sebagai suku asli di negara tersebut. Jikalau kemungkinan yang ingin diutarakan adalah terkait keaslian ras masing-masing individu yang mengklaim dirinya sebagai suku Asli Ainu, hal tersebut juga seharusnya berdasarkan fakta. Meskipun diakhir kalimat tersebut, digunakan pertikel akhir ‘ne’ yang berfungsi untuk mengkonfirmasi kembali isi pernyataan sebelumnya, tetap saja harus berdasarkan fakta apakah memang sudah benar-benar tidak ada keturunan murni lagi dari suku Ainu.

Kalimat selanjutnya dalam cuitan tersebut adalah *Seizei Ainukei Nihonjin ga yoi tokoro desuga, kenri wo koushi shimakutteiru koto fugouri. Zeiseisha ni setsumei dekimasen* ‘Setidaknya sudah bagus dikatakan orang keturunan Ainu, sulit memahami tuntunan untuk menggunakan haknya (suku Ainu). Tidak bisa menjelaskannya pada

⁴ https://twitter.com/kaneko_yasuyuki/status/496986135386525696 (diaksesn 11 Juni 2020)

pembayar pajak'. Pernyataan tersebut dapat dianalisis telah melanggar maksim kuantitas dan maksim relevansi. Kaneko Yasuyuki sebagai pemroduksi tuturan, tidak memperhitungkan interpretasi yang mungkin dipikirkan oleh petutur terhadap ujarannya. berbagai opini dapat muncul karena cuitan yang diposting tidak cukup informatif, alih-alih malah memicu konflik dan memperjelas opini-opini yang cenderung diskriminatif. Pelanggaran terhadap maksim relevansi karena antara kalimat sebelumnya dan kalimat yang paling akhir, kurang memiliki korelasi. Hal tersebut karena Kaneko Yasuyuki tiba-tiba menyebut 'bagaimana harus mempertanggungjawabkan kepada pembayar pajak'. Kaneko tidak memberikan kejelasan perihal yang harus dipertanggungjawabkan, dan korelasi dengan suku Ainu harusnya sudah merasa cukup diakui sebagai suku Ainu saja.

Meskipun hanya satu cuitan, akan tetapi, setelah dianalisis ternyata terjadi pelanggaran terhadap keempat maksim kerja sama seperti yang dipaparkan oleh Grace. Pelanggaran tersebut, kemungkin dilakukan secara sengaja dan sadar oleh penutur (Kaneko Yasuyuki) yang dengan pilihan kata dan cara pengungkapan cuitannya menyiratkan maksud tertentu (implikatur) dan mengundang mereka yang setuju dan tidak setuju kepadanya beropini di publik.

IV. KESIMPULAN

Artikel ini menganalisis cuitan seorang politisi di daerah Hokkaido yaitu Kaneko Yasuyuki, terkait suku Ainu yang menjadi kotroversi di tahun 2014. Setelah dianalisis, cuitan tersebut melanggar maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim relevansi, maupun maksim cara. Hal tersebut karena cuitan itu disampaikan meskipun dengan cukup lugas, akan tetapi tidak memberikan kejelasan akan maksud yang dituturkan. Cuitan tersebut mengundang berbagai interpretasi, yang dikarenakan kekaburan dari hal yang disampaikan. Di samping itu, pernyataan yang disampaikan juga dicurigai tidak berdasarkan fakta, serta relevansi antar kalimat cukup membingungkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan disampaikan kepada Rektor Universitas Udayana dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana, serta Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana, atas dukungan serta bantuan Dana PNPB Universitas Udayana, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Penelitian ini didanai DIPA PNPB Universitas Udayana TA 2021. Semoga Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah di bidang kebahasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Omplication, et al. ANTHROPOLOGY IN SOCIAL CONTEXT: THE INFLUENCE OF NATIONALISM ON THE DISCUSSION OF THE AINU. In *Protland State University* (Issue 1959).
- [2] Tsutsui, K. (2013). Ainu Indigenous Rights Movement (Japan). *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements*. <https://doi.org/10.1002/9780470674871.wbespm230>
- [3] Rismaya, R. (2020). Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dan Kesantunan Berbahasa dalam Cuitan Twitter Bertema Internalized Sexism'Internalisasi Seksisme': Suatu Kajian Pragmatik. *Metahumaniora*, 10(3), 346-360.
- [4] M Hidayati, N. N. (2018). Pelanggaran Maksim (Flouting Maxim) Dalam Tuturan Tokoh Film Radio Galau Fm: Sebuah Kajian Pragmatik. *An-Nas*, 2(2), 248-263.
- [5] Rahardi, R. K. (2005). *Pragmatik: kesantunan imperatif bahasa Indonesia*. Erlangga.
- [6] Wedayanti, npl. 2021. Ujaran Kebencian Terhadap Zainichi Korea di Jepang. dalam *Linguistik Forensik, Studi Kasus Teks Lintas Bahasa*. Denpasar, Penerbit Pustaka Larasan.
- [7] Wedayanti, npl&Dewi, nmaa. 2021. Strategi Ketidaksantunan Tuturan Pada Media Sosial di Jepang terkait Suku Ainu. dalam *Antologi Kajian Linguistik dan Sastra Jepang*. Yogyakarta, Deepublish Publisher.
- [8] Dewi, N. M. A. A., & Wedayanti, N. P. L. KESANTUNAN BERBAHASA YANG TERCERMIN DALAM AIMAI HYÖGEN.